



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI PAJAK USAHA RUMAH KOS DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

SKRIPSI



OLEH:

RESTIKA NINGSIH
NIM. 11327202262

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI PAJAK USAHA RUMAH KOS
DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

RESTIKA NINGSIH
NIM. 11327202262

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU-RIAU

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI PAJAK USAHA RUMAH KOS DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL**, yang ditulis oleh:

Nama : Restika Ningsih
 NIM. : 11327202262
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2019
 Pembimbing Skripsi

H. Mhd. Kastulan, SH, MH.
 NIP. 196309091990021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul ***Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel*** yang ditulis oleh:

Nama : Restika Ningsih
NIM. : 11327202262
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH., MH.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Restika Ningsih (2019). Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Permasalahan di lapangan dalam usaha rumah kos-kosan ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha khususnya rumah kos kosan yang tidak mendaftarkan usahanya seperti telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan adanya masalah yang dimaksud dan banyaknya bisnis rumah kos-kosan khususnya di daerah sekitaran kampus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat diambil suatu : Optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak dan retribusi baru. Faktor-faktor saja yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel antara lain masalah penzinan, wajib pajak yang belum terdaftar, rendahnya kepatuhan wajib pajak, komunikasi dan sosialisasi pajak rumah kos kepada para pemilik kos dan sumber data pemungut pajak yang masih minim.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperbolehi Gelar Serjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materi yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama ayahnda Kamarudin dan ibunda Linda Dewi, yang telah memberikan kasih sayangnyadan memotivasi agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semua pengorbanan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntutlilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH, MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah, staf jurusan ilmu hukum, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H.M. Kastulani, SH., MH., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian studi penulis.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberi ilmu-ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini, mengerti apa yang belum penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

7. Fadla Sulaiman, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat penulis Pebriani Gusman, Azlina Fazira, Lusi Maida Lestari dan tim KKN Desa Petonggan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebajikan, Amiiin ...

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wraahmatullahiwabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2019

Penulis,

Restika Ningsih

NIM. 11327202262

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	11
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	11
B. Tinjauan Umum Kecamatan Tampan	12
C. Kantor Pelayanan Pajak Tampan	16
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan tentang optimalisasi	20
B. Usaha Rumah Kos.....	21
C. Pajak.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	40
B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekanbaru yang berkembang sangat pesat menjadi daya tarik sebagian masyarakat dari luar untuk datang ke kota ini dengan berbagai alasan, baik untuk keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar atau berwisata. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang diperlukan. Banyak pengusaha maupun penduduk asli di Pekanbaru memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel.

Pendirian rumah kos, sebagaimana pendirian bangunan lainnya di Pekanbaru diatur sedemikian rupa. Prosedur dalam pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang harus dilalui oleh para pemilik/pengguna jasa izin mendirikan bangunan itu sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam pelayanan izin mendirikan bangunan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan *advise planning* ke Sekretariat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru melalui Staf dilengkapi dengan persyaratan antara lain: (Mengisi formulir AP & fotocopi rangkap 2, fotocopi KTP rangkap 2, fotocopi sertifikat tanah rangkap 2, fotocopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir rangkap 2, menyiapkan gambar rencana bangunan yang diketahui oleh pemegang SIBP rangkap 2) diperiksa oleh petugas selama 1 hari. Setelah *advise planning* dikeluarkan barulah pemohon bisa melanjutkan memasukkan berkas permohonan izin mendirikan bangunan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

persyaratan antara lain: (Formulir Permohonan IMB, Fotocopy Surat Tanah, Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Pembayaran PBB, Advis Planning, Gambar Rencana, Surat Kuasa untuk bangunan yang bukan di atas Tanahnya, Izin dan Rekomendasi dari Instansi Terkait bagi bangunan yang disyaratkan, Surat Persetujuan Masyarakat sekitar diketahui oleh Pejabat setempat bagi bangunan yang disyaratkan) dengan waktu selama 15 menit.

Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh Kepala Seksi dan di disposisi atau diperiksa oleh Kepala Dinas jika berkasnya lengkap dilimpahkan kepada Kepala Bidang untuk diproses sesuai aturan dengan waktu 1 hari, setelah itu Kepala Bidang memerintahkan kepada Kepala Seksi Penelitian Administrasi untuk memproses kembali permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kepala Seksi Penelitian Teknis. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau ditolak, selanjutnya Kepala Seksi memeriksa gambar rencana (advis planning) dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kepala Seksi Perhitungan Retribusi. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki atau ditolak dengan waktu 3 hari.

Dalam menghitung pajak yang perlu diperhatikan adalah tentang Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan WP Peseorangan yang mengklasifikasi domisili wajib pajak menjadi tiga daerah dengan persentase penghitungan penghasilan netto yang berbeda yaitu. (1) 10 ibu kota propinsi meliputi, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pontianak, Makassar, Manado, Medan, Palembang. (2) Kota Propinsi lainnya (3) Daerah lainnya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu lebih dioptimalkan lagi pungutan terhadap pajak. Optimalisasi berasal dari kata *optimum*, yang berarti yang terbaik atau yang paling menguntungkan.¹ Optimalisasi berarti suatu cara yang terbaik dan yang paling menguntungkan untuk mencapai sesuatu.

Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam usaha rumah kos-kosan ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha khususnya rumah kos kosan yang tidak mendaftarkan usahanya seperti telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektivitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.²

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan

¹ Poerwadarmanta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 812

² Risma. *Pengertian Optimalisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.³

Salah satu objek pajak yang belum digarap dengan baik adalah kos dan penginapan. Di Pekanbaru, khususnya di daerah kecamatan Tampan, lahan bisnis kos-kosan ini tidak hanya dilirik oleh penduduk setempat tetapi juga menjanjikan bagi para investor yang berasal dari luar Kota Pekanbaru untuk berinvestasi di kota ini. Dapat dilihat keuntungannya bagi Pemerintah daerah setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan di daerah. Namun hasil penelusuran awal penulis menemui permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa rumah tinggal yang disulap menjadi rumah kos
2. Pendirian rumah kos selain untuk tempat tinggal juga memiliki aturan tertentu untuk dijadikan tempat usaha
3. Menurut Kepala UPTD Kec. Tampan di Kecamatan Tampan sampai bulan April 2018 baru terdata 26 rumah kos.⁴

Berdasarkan fenomena di atas, menunjukkan bahwa pemilik rumah kos belum mengetahui prosedur pendirian rumah kos. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Sedangkan pihak dari Pemerintah yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk di temui. Berdasarkan permasalahan yang ada, diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan yuridis optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan

³ W.J.S. Poerdwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 812

⁴ Riauaktual.com, *Kost di Pekanbaru Sudah Dikenakan Pajak*, riauaktual.com, Jum’at 13 Mei 2016, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46..



berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel”.

B. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Tinjauan yuridis optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikemukakan untuk dikaji selanjutnya adalah

1. Bagaimanakah optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui tinjauan yuridis optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan;
- 2) Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini dimasa datang;

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Pemilihan lokasi dilakukan dengan alasan adanya masalah yang dimaksud dan banyaknya bisnis rumah kos-kosan khususnya di daerah sekitaran kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Universitas Riau.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.⁵

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.⁷ Yang dijadikan populasi adalah pemilik kos dan pegawai pajak.

Sampel adalah sebagian atau yang mewakili yang di teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Riau, petugas lapangan serta pemilik kos. Metode yang dipakai adalah Metode *Purposive*. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.⁸

Tabel 1.1
Populasi dan sampel penelitian

No	Sampel	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Riau	1	1
2	Petugas Lapangan UPTD Kec. Tampan	2	1
3	Pemilik kos	40	10

Sumber: Observasi penelitian, 2018.

⁵ Suratman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

88

⁶ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 4.

⁷ Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta), h. 108

⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2005), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diambil langsung dari lapangan yaitu keterangan berkaitan dengan jumlah kos, alamat kos dan pemilik kos. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.⁹

b. Data Skunder

Yaitu informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, pasar modal, perbankan, dan keuangan.¹⁰

5. Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara :

1. Wawancara

Penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan.¹¹

⁹ Rosady Ruslan, *Op. Cit.*, h. 29.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.¹²

3. Observasi

Observasi dimaksudkan untuk menjaring data awal sebelum melakukan penelitian. Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan yang berisi informasi awal.

4. Studi kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk mencari atau mendapatkan informasi dari jurnal ilmiah, buku, dan bahan referensi lainnya khususnya di perpustakaan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis isi yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk kalimat deskriptif kualitatif, menarik kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.¹³

F. Sistematika Penulisan

¹² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236

¹³ *Ibid.*, h. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tentang pengertian pajak, jenis pajak, pengertian kos dan hotel, ketentuan pajak rumah kos.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang menjadi permasalahan yaitu: 1) optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau).

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan Wilayah Administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.¹⁴

B. Tinjauan Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu

¹⁴ Wikipedia. Sejarah Kependudukan Kota Pekanbaru, <http://www.Sejarah Kependudukan Kota Pekanbaru.com> diakses pada Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 09.45 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi

- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Dari empat desa inilah Kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan PERDA No. 03 tahun 2003, tentang pemekaran Kecamatan Tampan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai.

Batas-batas Kecamatan Tampan setelah dimekarkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kecamatan Tampan 59,81 km² terdiri dari 4 kelurahan:

- a. Kelurahan Simpang Baru yang luas wilayahnya 23,59 km²
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat yang luas wilayahnya 13,69 km²
- c. Kelurahan Tuah Karya yang luas wilayahnya 12,09 km²
- d. Kelurahan Delima yang luas wilayahnya 10,44 km²

Mengenai pendidikan, Negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan ke arah pembentukan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Tampan jauh menunjukkan kemajuan, kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Tampan.

Tabel 2.1
Kemajuan pendidikan di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Tingkatan sekolah					
		TK	SD	SLTP	SMK	SMU	PERGURUAN TINGGI
1	Simpang Baru	11	5	2	3	1	3
2	Sidomulyo Barat	7	5	1	1	1	1
3	Tuah Karya	12	10	3	0	1	0
4	Delima	10	7	3	2	1	0
	Jumlah	40	27	9	6	1	4

Sumber: BPS, 2015

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa di Kecamatan Tampan terdapat sarana pendidikan dari yang swasta sampai yang negeri mulai dari TK, SD, SLTP, SMU Kejuruan dan SMU Umum. Di Kecamatan Tampan juga terdapat 4 Perguruan Tinggi yaitu UIN Suska Riau, UNRI, STIE AKBAR Riau dan STMIK-AMIK Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Daftar Sebagian Rumah Kos di Kecamatan Tampan

No	Nama kos	Alamat
1.	Dika	Tuah Karya, Tampan
2.	Khairunnisa	Tuah Karya, Tampan
3.	Kos Putra Mulyadi	Tuah Karya, Tampan
4.	Kos Imelda	Tuah Karya, Tampan
5.	Kos Laki-Laki Pondok Melati	Tuah Karya, Tampan
6.	Kos Laura Violet	Tuah Karya, Tampan
7.	Kos Putri Yanza	Tuah Karya, Tampan
8.	Kos Putra Purnama Jaya	Tuah Karya, Tampan
9.	Kos Putra Adil	Tuah Karya, Tampan
10.	Kos Putri Lestari	Tuah Karya, Tampan
11.	Kos Putra Ibu Vika	Tuah Karya, Tampan
12.	Kos Putri Ibu Mega	Tuah Karya, Tampan
13.	Kos Putri Rizki	Tuah Karya, Tampan
14.	Kos Putri Panam	Tuah Karya, Tampan
15.	Kos Muslim	Tuah Karya, Tampan
16.	Kos Panam Alkahfi Pekanbaru	Tuah Karya, Tampan
17.	Kos Putri Nabila	Tuah Karya, Tampan
18.	Kos Putri Dewi Julia	Tuah Karya, Tampan
19.	Kos Muslimah Hj. Rainisma	Tuah Karya, Tampan
20.	Kos Putra Tansel	Tuah Karya, Tampan
21.	Kos Shanta	Tuah Karya, Tampan
22.	Kos Putri Mayu	Tuah Karya, Tampan
23.	Kos Putri Srikandi	Tuah Karya, Tampan
24.	Kos Putra Rimba	Tuah Karya, Tampan
25.	Kos Quba	Tuah Karya, Tampan
26.	Kos Putra Seni	Tuah Karya, Tampan
27.	Kos Khairani	Tuah Karya, Tampan
28.	Kos Putri DS	Tuah Karya, Tampan
29.	Kos Putri Dhuha	Tuah Karya, Tampan
30.	Kos Ar Rahman	Tuah Karya, Tampan
31.	Kos Kamar Jembar	Tuah Karya, Tampan
32.	Kos Putri Jezy	Tuah Karya, Tampan
33.	Kos Pondok Tiara	Tuah Karya, Tampan
34.	Kos Pria Rida	Tuah Karya, Tampan
35.	Kos Pondokan Florina	Tuah Karya, Tampan
36.	Kos Putra Ibu Fatimah	Tuah Karya, Tampan
37.	Kos Putri Mulia 2	Tuah Karya, Tampan
38.	Kos Putri Bude Sari	Tuah Karya, Tampan
39.	Kos Pondokan Disha	Tuah Karya, Tampan
40.	Kos Cempaka Kuansing	Tuah Karya, Tampan

Sumber: Googlemaps, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Tampan banyak terdapat kos. Tabel di atas, hanyalah sebagian kos yang bisa disebutkan dan terdapat ratusan kos yang dikelola oleh masyarakat di daerah sekitar kampus di daerah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.

C. Kantor Pelayanan Pajak Tampan

Pada Awalnya di Pekanbaru terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP Senapelan), satu Kantor Pelayanan PBB (KPPBB Pekanbaru) dan satu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa Pekanbaru) di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Bagian Tengah. Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, pada tahun 2002 di Pekanbaru terbagi dalam dua kewilayahan Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah Kerja KPP Pekanbaru Tampan Meliputi Wilayah Administrasi: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Madya Pekanbaru (Khusus Kecamatan Tampan dan Payung Sekaki). Saat itu KPP Pekanbaru Tampan ber Kantor di sebuah Ruko di Jalan Riau Ujung No.234 Pekanbaru.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang merupakan hasil penggabungan KPP Pekanbaru Tampan, KPPBB Pekanbaru, dan Karikpa Pekanbaru ber alamat di Jalan MR SM Amin / Ring Road (Arengka II) Pekanbaru mempunyai Wilayah Kerja Meliputi lima Kecamatan di Kota Pekanbaru Yaitu: Kecamatan Sukajadi, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tampan dan Payung Sekaki.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

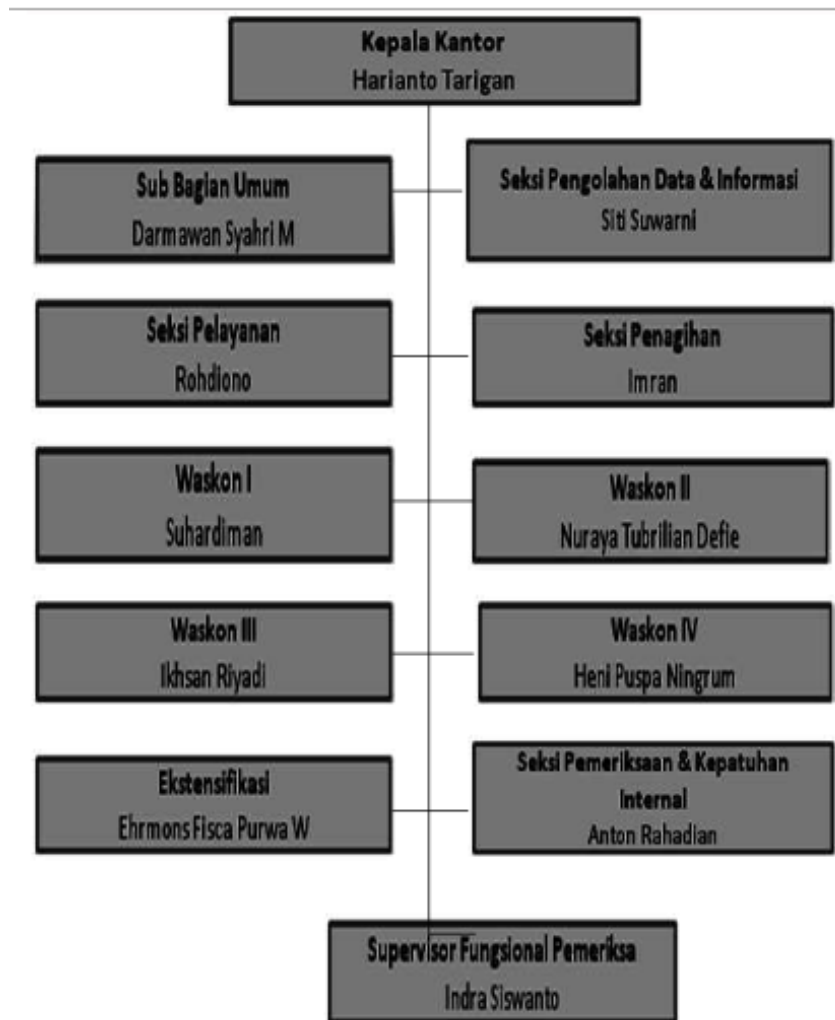
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPPPratama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative (AR)* yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, *faximile* maupun *e-mail*. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif. Dengan adanya peran AR tersebut, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara berkesinambungan.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan jumlah pegawai di KPP Prtama Tampan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	F	P
1	Kepala Kantor	1	2,5%
2	Kasub Bagian Umum	1	2,5%
3	Kasi Penagihan	4	3%
4	Kasi Ekstensifikasi	4	3%
5	Kasi RIKI	4	3%
6	Kasi Pelayanan	12	50%
7	Kasi PDI	6	5%
8	Kasi Waskon I	5	4%
9	Kasi Waskon II	6	5%
10	Kasi Waskon III	7	8%
11	Kasi Waskon IV	5	4%
12	Fungsional Pemeriksa	8	10%
	Jumlah	67	100%

Sumber data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah pegawai dari setiap masing-masing pimpinan KPP PPT, Kepala Kantor berjumlah 1 orang atau 2,5%, Kasub Bagian Umum berjumlah 1 orang atau 2,5%, Kasi Penagihan berjumlah 4 orang atau 3%, Kasi Ekstensifikasi berjumlah 4 orang atau 3%, Kasi RIKI berjumlah 4 orang atau 3%, Kasi Pelayanan berjumlah 12 orang atau 50%, Kasi PDI berjumlah 6 orang atau 5%, Kasi Waskon I berjumlah 5 orang atau 4%, Kasi Waskon II berjumlah 6 orang atau 5%, Kasi Waskon III berjumlah 7 orang atau 8%, Kasi Waskon IV berjumlah 5 orang atau 4%, Fungsional Pemeriksa berjumlah 8 orang atau 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai dari setiap masing-masing pimpinan yang paling banyak adalah Kasi Pelayanan berjumlah 50%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang optimalisasi

Menurut Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁵

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.¹⁶

Pengertian optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, h 628

¹⁶ Risma. *Pengertian Optimalisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Menurut Winardi Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁷
 2. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.¹⁸
- Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

B. Usaha Rumah Kos

1. Pengertian Usaha

Kita pasti sering mendengar kata usaha dalam kehidupan sehari - hari.

Kata usaha memang sangat umum digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, pengertian dan definisi usaha dalam kehidupan sehari - hari dan dalam dunia bisnis memiliki perbedaan yang sangat berarti. Dalam tulisan ini nanti akan dijelaskan pengertian dan definisi usaha dari beberapa sudut pandang dan penggunaan dari kata usaha itu sendiri.

Menurut Harmaizar Z dalam buku "Menangkap peluang Usaha" Usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk

¹⁷ Risma. *Pengertian Optimalisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

¹⁸ Risma. *Pengertian Optimalisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.

Sedangkan usaha adalah upaya kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran, pekerjaan, mata pencaharian, nafkah, kegiatan dibidang perdagangan, kegiatan dibidang industri dsb, ikhtiar.¹⁹

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

Kriteria lainnya dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Industri kecil juga dapat berarti industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga.

Menurut Kwartono Adi banyak definisi usaha kecil atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dipahami baik dari lambaga lokal maupun asing. Namun demikian, perbankan Indonesia menggunakan definisi

¹⁹ Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), cet. Ke-1, h. 430.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UMKM sesuai dengan kesepakatan Menko Kesra dengan Bank Indonesia (BI). Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan Undang Undang Nomor 9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut:²⁰

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp.100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia. Berbeda pula dengan pendapat Mulyadi Nitisusastro bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria yang dimaksud adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.²¹

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1.000.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia. Sedangkan menurut Mulyadi Nitisusastro (2009:268) bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

²⁰ Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007, h. 12

²¹ Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta: Bandung, 2009, h. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Adapun kriteria yang dimaksud adalah memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 Milyar.²²

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9/BKr, tgl. 17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:²³

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .
3. Milik Warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

²² Mulyadi Nitisusastro, *Ibid.*, h. 268

²³ Kwartono Adi, *Op. Cit.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha menengah menurut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 adalah:²⁴

1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. milik Warga Negara Indonesia.
3. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
4. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.

2. Jenis-jenis Usaha

Sekarang ini banyak ragam jenis usaha UMKM di Indonesia, buku-buku yang mengulas jenis usaha UMKM sudah banyak, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok:²⁵

a. Usaha perdagangan

Keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, dan lain-lain.

Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain.

Ekspor/impor: produk lokal dan internasional. Sektor informal: pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Usaha pertanian

²⁴ Kwartono Adi, *Op. Cit.*, h. 12

²⁵ Kwartono Adi, *Op. Cit.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meliputi perkebunan pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan: ternak ayam, petelur, susu sapi. Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lain-lain.

c. Usaha industri

Industri makanan dan minuman, pertambangan, pengrajin, konveksi dan lain-lain.

d. Usaha jasa

Jasa konsultan, perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.

3. Rumah kos

Pada penafsiran dengan pendekatan bahasa ini akan merujuk pada kamus bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia, wikipedia sebagai ensiklopedia yang banyak digunakan sebagai sumber referensi dalam media elektronik, dan kelaziman bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah memberikan pengertian hotel di dalam pasal 1:

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).²⁶

Pengertian hotel menurut undang-undang telah menjadikan rumah kos yang berjumlah 10 kamar sebagai hotel. Undang-Undang telah memberikan ekstensifikasi pengertian hotel. Hal ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk melihat terlebih dahulu pasal pengertian hotel yang menyebutkan beberapa jenis tempat penginapan yang masuk kategori hotel. Berikut ini beberapa jenis penginapan yang disebutkan di dalam pengertian hotel (UU PDRD) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁷, wikipedia dan bahasa kelaziman yang digunakan masyarakat:

a. Istilah Hotel

Menurut wikipedia, hotel berasal dari kata *hostel* (bahasa perancis kuno). Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi sebagai berikut:

Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial. Disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.²⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hotel adalah tempat untuk menginap orang yang sedang di perjalanan, hal ini tentunya lebih

²⁶ Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

²⁸ Ibid, hlm. 508

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat insidental, bukan sebuah kebutuhan pokok. Berdasarkan perspektif sosial, orang yang pergi ke hotel biasanya cenderung dinikmati bagi kelompok yang mampu (bisa disebut orang kaya), karena dianggap sebagai kebutuhan sekunder dan orang yang datang ke hotel pasti akan mendapatkan pelayanan.

b. Istilah Motel

Menurut wikipedia²⁹ motel merupakan singkatan bahasa Inggris, *motorist hotel*, yang berarti serupa hotel yang diperuntukkan untuk melayani tamu yang transit. Kamus Bahasa memberikan pengertian pertama adalah sebagai mobil hotel dan yang kedua adalah: Penginapan yang ditujukan terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia³⁰.

Pengertian motel di atas juga menunjukkan bahwa konsumen motel adalah pelancong yang bermobil. Hal ini tentunya menunjukkan keadaan ekonomi konsumen adalah keadaan mampu karena mereka yang datang ke motel adalah orang-orang yang menggunakan mobil dan dalam keadaan di perjalanan. Pengertian di atas tentunya juga bisa dilihat bahwa fungsi motel sebagai tempat penginapan bagi tamu atau pelancong adalah bersifat sementara, insidental dan bukan merupakan kebutuhan pokok, namun kebutuhan sekunder. Dalam perspektif sosial, orang yang bermobil adalah orang yang dianggap mampu secara ekonomi.

²⁹ Wikipedia. Motel. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

³⁰ *Ibid*, hlm. 930

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Istilah Losmen

Menurut wikipedia:

Losmen berasal dari bahasa Perancis *logement* yang berarti penghunian, adalah sejenis penginapan komersial yang memberikan penawaran tarif lebih murah dari hotel.³¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan³².

Berdasarkan pengertian di atas tentunya juga menunjukkan bahwa losmen merupakan sebuah penginapan yang bersifat sementara dan bukan sebagai tempat tinggal. Losmen di dalam prakteknya hampir sama dengan hotel namun yang berkelas melati (berdasarkan tingkatan hotel). Losmen kalau ditinjau berdasarkan perspektif kebutuhan merupakan kebutuhan sekunder bagi tamu yang sedang dalam perjalanan.

d. Istilah Gubuk Pariwisata

Gubuk pariwisata merupakan penggabungan antara kata gubuk dan pariwisata. Menurut kamus bahasa Indonesia gubuk adalah rumah kecil (biasanya yang kurang baik dan bersifat sementara), atau disebut dangau.³³ Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang

³¹ Wikipedia. Losmen. <https://id. M.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

³² Poerwadarminta. *Op.cit.*, h. 842

³³ *Ibid.* hlm. 463

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme.³⁴

Pengertian di atas juga menunjukkan bahwa gubuk pariwisata adalah berfungsi sebagai tempat penginapan sementara yang digunakan oleh para wisatawan. Gubuk pariwisata dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder dan bersifat insidental. Gubuk pariwisata tentunya selalu berada di dekat lokasi pariwisata yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

e. Istilah Wisma Pariwisata

Wisma pariwisata merupakan penggabungan dari kata wisma dan pariwisata. Wisma menurut KBBI adalah:

“bangunan untuk tempat tinggal, kantor, dsb, graha atau dapat diartikan sebagai kumpulan rumah dan komplek perumahan permukiman.”³⁵

Kata wisma pariwisata tentunya memiliki pengertian yang berbeda lagi, wisma dalam kata wisma pariwisata tentunya sudah bukan menjadi fungsi tempat tinggal lagi, karena berada di lokasi pariwisata, sehingga wisma pariwisata diartikan sebagai tempat penginapan, bukan tempat tinggal. Sebagai tempat penginapan bagi wisatawan tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang bersifat sementara dan insidental.

³⁴ *Ibid.* hlm. 1023

³⁵ *Ibid.* hlm. 1563

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Istilah Pesanggrahan

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pesanggrahan merupakan rumah peristirahatan atau penginapan.³⁶ Fungsi pesanggrahan menurut pengertian di atas adalah berfungsi sebagai tempat penginapan yang tentunya sifatnya adalah sementara, karena digunakan bagi orang yang menginap (tempat bermalam).

g. Istilah Penginapan

Istilah penginapan menurut KBBI disebut sebagai rumah tempat bermalam, losmen, atau tumpangan untuk bermalam³⁷. Menurut pengertian dalam kehidupan sehari-hari, penginapan identik dengan tempat bermalam yang sifatnya sementara dan tidak untuk waktu yang lama. Pada definisi hotel yang ada di dalam UU PDRD menyebutkan penginapan dan sebagainya, dan sebagainya yang dimaksud disini tentunya adalah bisa diartikan sebagai tempat untuk menginap.

g. Istilah Rumah Kos

Istilah rumah kos adalah istilah tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kamus besar bahasa Indonesia tidak menyebut istilah rumah kos, namun terdapat istilah indekos. Istilah indekos oleh KBBI diberikan pengertian yaitu:

³⁶ *Ibid.*, h. 1064

³⁷ *Ibid.*, h. 530

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan), memondok. Contoh: tetangga saya tidak menerima orang indekos, hanya menyewakan kamar”.³⁸

Istilah mengindekoskan menurut KBBI adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar, memondokkan.

Menurut Wikipedia: kost atau *indekost* adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata "*kost*" sebenarnya adalah turunan dari frasa bahasa Belanda "*In de kost*". Definisi "*In de kost*" sebenarnya adalah "makan di dalam" namun bila frasa tersebut dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka rumah kos adalah berfungsi sebagai tempat tinggal untuk waktu tertentu dan bukan berfungsi sebagai penginapan. Penginapan dalam istilah sehari-hari adalah dipahami sebagai tempat bermalam, yang dihitung per malam atau per hari bersifat insidental, karena bukan untuk tempat tinggal.

C. Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib

³⁸ *Ibid.*, h. 531

³⁹ Wikipedia. Indekost. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁰

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴¹

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Jenis pajak

Menurut Resmi, berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.⁴²

Adapun jenis-jenis pajak antara lain adalah:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

⁴⁰ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak, Pasal 1

⁴¹ Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Saleemba Empat, h. 1

⁴² Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Saleemba Empat, h. 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

5. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).⁴³

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

⁴³ Resmi, *Op. Cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus* dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.⁴⁴

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya :

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan)

2. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.

3. Stelsel Campuran

⁴⁴ Resmi, *Ibid.*, h, 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) ⁴⁵

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.⁴⁶

1. *Official Assessment System*

⁴⁵ Resmi, *Ibid.*, h. 10

⁴⁶ Resmi, *Ibid.*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

2. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding system*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

d. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Resmi, ada 3 macam tarif pajak, yaitu: ⁴⁷

1. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif proporsional (sebanding), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

⁴⁷ Resmi, *Ibid.*, h, 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu :
 - a. Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b. Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
 - c. Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
 - d. Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding) dan tarif progresif (meningkat).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Optimalisasi pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak baru.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pajak usaha rumah kos di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel antara lain masalah perizinan, wajib pajak yang belum terdaftar, rendahnya kepatuhan wajib pajak, komunikasi dan sosialisasi pajak rumah kos kepada para pemilik kos dan sumber daya pemungut pajak yang masih minim.

B. Saran

Dari latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi pemerintah daerah agar mengkaji ulang peraturan pajak hotel atas rumah kos tersebut, agar dibuatkan peraturan khusus mengenai pajak rumah kos, dan tidak membaurkannya dengan Pajak Hotel, sehingga aturan tersebut lebih jelas keberadaannya dan masyarakat bisa lebih paham dan mengetahui keberadaan peraturan pajak rumah kos tersebut.

2. Kepada pengelola kost perlu diberikan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran agar naluri mematuhi peraturan khususnya tentang perpajakan. Selain itu perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak kos, sehingga dicapai kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan perda tentang rumah kos.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Nusa. Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3
- Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006, cet. Ke-1.
- Arunkunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta: Bandung, 2009
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suatman Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014

Undang Undang

- Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak, Pasal 1



Website

Riauaktual.com, *Kost di Pekanbaru Sudah Dikenakan Pajak*, riauaktual.com, Jum'at 13 Mei 2016, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46..

Risma. *Pengertian Optimalisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

UPTD Kec. Tampan di Kecamatan Tampan, 2019.

Wikipedia. Indekost. <https://id. M.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

Wikipedia. Losmen. <https://id. M.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

Wikipedia. Motel. <https://id. M.wikipedia.org/wiki/motel> 2017, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 11.46.

Wikipedia. Sejarah Kependudukan Kota Pekanbaru, <http://www.Sejarah Kependudukan Kota Pekanbaru.com> diakses pada Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 09.45 wib.

Yusmainar, 47 tahun, Pengusaha Rumah Kos, *Wawancara*, 4 Oktober 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel* yang ditulis oleh:

Nama : Restika Ningsih
NIM. : 11327202262
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Roni Ku. niawan, SH., MH.

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH.

Kepala Sub Bagian Akademik
Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP.19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul :TINJAUAN YURIDIS OPTIMALISASI USAHA RUMAH KOS
THE NENCY'S HOMESTAY DI KECAMATAN TAMPAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2011, ditulis oleh
saudari:

Nama : Restika Ningsih
NIM : 11327202262
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : Kamis/ 22 November 2018
Narasumber : Musrifah, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik


Rosnati S. Ag
19740910 200312 2 003

Pekanbaru, 20 Desember 2018
Narasumber


Musrifah, SH., MH
NIP.130 217 039

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Restika Ningsih |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11327202262 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Tinjauan yuridis optimalisasi pajak rumah kost
dikecamatan tampan berdasarkan peraturan daerah kota
pekanbaru nomor 7 tahun 2011 |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 22 November 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi
jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah
yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Musrifah

Musrifah, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1509/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : RESTIKA NINGSIH
N I M : 11327202262
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 10 JANUARI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag
NID 193807121986031005

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Restika Ningsih, lahir di Danau Bingkuang. Lahir pada tanggal 22 November 1995 merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan Kamarudin dan Linda Dewi. Pendidikan dimulai dari Sekolah Negeri 002 Tambang, didesa Pulau Permai, Kecamatan Tambang pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan dasar tersebut pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat pertama yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri Kampar dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri Kampar pada jurusan IPS dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Magang di Kantor Notaris Murniarti, SH. M. Kn dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kamim, Kabupaten Indra Giri Hulu pada juli 2016.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel** “. Lulus setelah di Munaqasyahkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan predikat sangat memuaskan serta berhak menyandang gelar Serjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU